

THE URGENCY OF DEMOCRATIC ETHICS IN SHAPING NATIONAL INTEGRATION

Urgensi Etika Demokrasi Dalam Membentuk Integrasi Nasional

Fifi Zuhriah^{1a*}, Heru Ismaya^{2b}

¹² Program Studi PPKn IKIP PGRI Bojonegoro

^a fifi_zuhriah@ikipgribojonegoro.ac.id

^b heru.ismaya@ikipgribojonegoro.ac.id

(*) Corresponding Author

fifi_zuhriah@ikipgribojonegoro.ac.id

How to Cite: Fifi Zuhriah. (2025) Urgensi Etika Demokrasi Dalam Membentuk Integrasi Nasional doi: 10.36526/js.v3i2.5149

Received : 18-03-2025

Revised : 25-04-2025

Accepted: 29-04-2025

Keywords:

Democratic ethics,
National integration

Abstract

Ethics are guidelines and orientations in decision-making, activities, and human actions in undergoing democracy. The implementation of democratic values in the life of the nation and state is certainly not free from violations related to violations of democratic values. Violations of democratic values are acts of discrimination against certain individuals (human rights violations). This reflects that society has not yet realized democratic values in its life. National integration is a way out to deal with various conflicts. National integration as an Indonesian cultural strategy basically unites the vision and mission between a number of interests and identities of each member of society with a complex cultural background. By upholding the principles of ethics in the application of democracy. This research is a literature analysis research, which is qualitative in nature. Qualitative field research conducted by researchers to examine a reference to study and analyze the urgency of democratic ethics in forming national integration. So this research is This research is descriptive qualitative.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, politik bukan sekadar proses pengambilan keputusan publik, tetapi juga panggung kekuasaan, persaingan ideologi, serta refleksi dari dinamika sosial masyarakatnya. Namun, dalam konteks kekinian, ada kebutuhan mendesak untuk mengadopsi konsep politik yang arif dalam suatu pendekatan yang bijaksana, seimbang, serta mampu menciptakan keadaban, kekeluargaan dan kemajuan bersama. Dalam hal ini demokrasi dijadikan pijakan tanpa membangun etika politik, atau dengan kata lain demokrasi adalah semata-mata menghadirkan dukungan rakyat tanpa sama sekali menggunakan etika Politik untuk bersikap dalam berdemokrasi.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang mampu bersikap dan bertindak sesuai nilai-nilai demokrasi, salah satunya diupayakan melalui proses pendidikan. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sebuah pendidikan yang dilaksanakan secara demokrasi pada mengembangkan sikap warga negara yang baik dan berperan dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak luput dari pelanggaran yang terkait pada pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Menurut Kladen (2014) menyebutkan beberapa pelanggaran yang terjadi terkait dengan pelanggaran nilai-nilai demokrasi yaitu tindakan diskriminasi pada suatu oknum tertentu (pelanggaran HAM), kebebasan berekspresi, tindakan kekerasan, adanya geng klithih, kasus pemilu dan tindakan intoleran (Kompas.com). Pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, akan tetapi dilakukan pula oleh elit-elit pemerintahan serta aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat belum mewujudkan nilai-nilai demokrasi pada kehidupannya.

Praktik demokrasi kita masih sangat belia dalam mewujudkan menjadi negara demokrasi yang mapan. Identitas adalah representasi diri seseorang atau masyarakat melihat dirinya sendiri dan bagaimana orang lain melihat mereka sebagai sebuah entitas sosial-budaya. Dengan demikian, identitas adalah produk kebudayaan yang berlangsung demikian kompleks.

Etika demokrasi dapat diartikan sebagai usaha untuk melakukan nilai-nilai demokrasi ke dalam proses kehidupan bersamasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga diharapkan dapat memperoleh kesadaran mengenai nilai-nilai demokrasi serta menginternalisasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sikap, tingkah lakunya.

Pada suatu sisi integrasi terbentuk kalau ada identitas yang mendukungnya seperti kesamaan bahasa, kesamaan dalam nilai sistem budaya, kesamaan cita-cita politik, atau kesamaan dalam pandangan hidup atau orientasi keagamaan. Pada pihak lain, integrasi yang lebih luas hanya mungkin terbentuk apabila sekelompok orang menerobos identitasnya dan mengambil jarak dari segala yang selama ini dianggap membentuk watak dirinya atau watak kelompoknya. Dengan demikian ia meninggalkan identitasnya, yang kemudian membuka kemungkinan untuk pembentukan integrasi yang lebih luas. Integrasi nasional terjadi juga akibat terbentuknya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial, yang didorong dengan adanya kebebasan berpendapat, bertoleransi, dan adanya pengakuan tentang Hak Azasi manusia itu sendiri.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian analisis pustaka, yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif lapangan yang dilakukan peneliti untuk meneliti sebuah referensi untuk mengkaji dan menganalisis tentang urgensi etika demokrasi dalam membentuk integrasi nasional. Sehingga penelitian ini merupakan Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, "Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya" (Lexy J. Moleong ; 2013)

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan informasi dan bahan terkait dengan persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan bagaimana perlindungan dan pemenuhan hukum dan hak dalam setiap warga negara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari buku dan literatur lain. Adapun analisis data yang digunakan peneliti adalah melalui analisis kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Etika Berdemokrasi

Kesadaran akan kehidupan yang harmonis dalam suatu masyarakat, bangsa dan negara, merupakan suatu hal yang harus dan wajib dilakukan oleh setiap warga masyarakat maupun warga negara. Kehidupan tersebut dapat dibingkai dalam suatu wadah yang kita sebut demokrasi. Etika demokrasi dapat dimulai dari pemahaman melalui ajaran agama atau religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, serta kepribadian Indonesia, yang merupakan pondasi utama dalam menjalankan kehidupan bangsa. Dari kesadaran tersebut, merupakan landasan etika dalam kehidupan berbangsa. Aktualisasi etika kehidupan berbangsa diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, di dalam konsederannya berbunyi: "untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sesuai Pembukaan UUD 1945 tersebut, diperlukan pencerahan sekaligus pengamalan etika kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia." Selanjutnya bahwa " Etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemuduran yang menyebabkan terjadi krisis multidemensi." Konsederan berikutnya bahwa " Untuk itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah

dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa dan bernegara.”

Saat ini, munculnya acaman yang serius terhadap persatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika berdemokrasi kehidupan berbangsa. Hal ini apabila ditiadakan proses demokrasi tanpa etika, maka akan muncul konflik sosial dimasyarakat. Pada dasarnya norma hidup ini bersangkutan dengan baik dan buruknya manusia berperilaku. Dengan kata lain, etika dapat dikatakan sebagai ajaran yang berisi tentang pantangan baik dan buruknya manusia berperilaku, atau merupakan suatu perintah yang harus dilakukan dan pantangan tersebut tidak boleh dilakukan. Sesungguhnya norma hidup semacam ini menggambarkan untuk tetap menjaga dan melestarikan suatu nilai yang dianggap baik dan penting di kalangan masyarakat. Oleh sebab itu, etika berisi tentang nilai dan prinsip moral yang wajib hukumnya dijadikan sebagai pedoman berperilaku. Adapun hal lainnya, etika memiliki kriteria tentang penilaian moral, yakni berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan berkaitan dengan apakah tindakan dan keputusan tersebut dapat dinilai dengan baik atau buruk secara moral. Adanya kriteria semacam ini disebut sebagai prinsip moral dan nilai. Diambil dari berbagai definisi diatas, bahwasannya etika dijadikan sebagai pedoman oleh manusia agar dapat hidup dan bertindak dengan lebih baik lagi. Dijelaskan bahwa etika memberikan suatu petunjuk, dijadikan arah sebagaimana dalam kehidupan bernegara.

Namun, dalam konteks kekinian, etika demokrasi merupakan kebutuhan mendesak untuk mengadopsi konsep politik yang arif dalam suatu pendekatan yang bijaksana, seimbang, serta mampu menciptakan keadaban, kekeluargaan dan kemajuan bersama. Demokrasi dijadikan pijakan tanpa membangun etika politik, atau dengan kata lain demokrasi adalah semata-mata menghadirkan dukungan rakyat tanpa sama sekali menggunakan etika Politik.

Negara Indonesia sejak didirikan oleh para *Founding Fathers* dibangun berdasar budaya kekeluargaan dan saling menghormati dengan nilai-nilai luhur yang berkeadaban. Para Pendiri Bangsa bersusah payah membangun negeri untuk mematri model kenegaraan tidak semata mengadopsi sistem dari luar, tetapi selalu melihat bagaimana konteks budaya dan keindonesiaan bisa melekat dalam kebangsaan dan kenegaraan. Maka Pancasila menjadi temuan yang mulia untuk dijadikan dasar negara sebagai berkeadaban dalam keragaman. Dasar negara ini menyelamatkan Indonesia dari keragaman yang rumit, antara nasionalisme dan keagamaan. Maka keunikan politik kita sampai saat ini membaurkan nilai-nilai budaya, seperti terbuka, menghargai dan kekeluargaan yang berkeadaban. Nilai dan etika demokrasi harus berkaca dari cara Pendiri Bangsa berpolitik di masa awal Indonesia.

Pada kenyataannya bahwa praktik demokrasi kita masih sangat belia dalam mewujudkan menjadi negara demokrasi yang mapan. Persaingan para kontestan, baik partai maupun lainnya harus selalu mengedepankan etika luhur yang konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Tampilan politik yang bermuka ganda dan apalagi tak beretika keindonesiaan, maka akan menimbulkan disintegrasi nasional yang pada akhirnya dapat menjalar terhadap perpecahan bahkan lebih ekstrim bisa jadi hilangnya kedaulatan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Etika Demokrasi Dalam Membentuk Integrasi Nasional

Sikap menjunjung tinggi nilai etika dalam berdemokrasi adalah hal mulia. Sikap etik itu akan menjadi cerminan bagi masyarakat sebagai bentuk keteladanan. Karenanya, menjaga etika merupakan hal penting dalam demokrasi. Demokrasi tidak hanya bertujuan menciptakan kebebasan mengeluarkan pendapat, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik). Etika harus jadi pedoman dan orientasi dalam pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam menjalani demokrasi.

Maraknya aksi protes yang seringkali mengabaikan etika, menunjukkan demokrasi di negara ini masih perlu dievaluasi. Apalagi pada masyarakat yang masih buta terhadap demokrasi, ideologi ini dianggap melunturkan budayanya. Padahal, jika demokrasi diterapkan dengan memperhatikan

etika, demokrasi dapat mengantarkan suatu bangsa menjadi sejahtera, makmur, harmonis, dan lebih beradab.

Memahami pentingnya etika berdemokrasi, dapat mencegah terjadinya fenomena tersesat di jalan demokrasi. Etika dalam demokrasi juga bisa menghindari perpecahan yang banyak mendatangkan kerugian. Sebagaimana firman Allah SWT, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." (QS. Ali Imran [3]: 103)

Terbentuknya integrasi nasional akibat terjadinya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya pluralitas bagi bangsa Indonesia adalah takdir. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak selalu memisahkan, apalagi menimbulkan pertentangan sepanjang masing-masing anggota masyarakat menyadari akan pluralitas tersebut. Gambaran pluralitas ini, kendati sudah merupakan takdir, namun akhir-akhir ini justru semakin memicu pertentangan di antara sejumlah anggota masyarakat. Bahkan, muncul adagium yang memicu konflik: "Kami versus kalian, aku versus kamu", dan seterusnya. Maka muncullah faham sentrisme yang kemudian melahirkan kelompok-kelompok seperti etnosentrisme, religisentrisme, politksentrisme, dan seterusnya. Sebagai ilustrasi, dalam budaya Jawa misalnya dikenal istilah "nanding sarira" memperbandingkan diri. Inilah pangkal munculnya kesombongan kolektif, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan kecenderungan untuk berfikir bahwa budaya etniknya lebih unggul dibandingkan dengan budaya etnik lain. Segala sudut sesuatu dilihat dari sudut pandang etniknya sendiri.

Etnosentrisme kian menguat justru ditopang dengan kebijakan negara yang mengembangkan otonomi daerah dan pemekaran daerah. Semangat otonomi daerah dan pemekaran daerah menjadi berjalan seiring dengan menguatnya etnosentrisme.

Dalam jangka panjang bukannya tak mungkin akan menyebabkan menyempitnya rasa integrasi nasional, karena integrasi cenderung lebih didasarkan pada faktor-faktor etnis dan faktor daerah/suku semata. Oleh karenanya, kita patut memperhatikan etika dalam berdemokrasi. Etika bukan hanya tentang peraturan dan tatanan formalitas belaka, tetapi menjadi falsafat hidup yang tertanam dalam jiwa sehingga membentuk karakter yang baik. Karakter yang menghasilkan perilaku-perilaku yang tangguh dengan tidak mengedepankan egoisme. Etika demokrasi yang santun dan ideal yang mengusung keterbukaan bagi sesama memerlukan serangkaian prinsip, praktik, dan nilai-nilai yang mendasari perilaku dalam demokrasi itu sendiri. Untuk menerapkann demokrasi yang santun berakar pada etika, rasa hormat, dan tanggung jawab terhadap individu serta Masyarakat, perlu keterbukaan dalam konteks politik yang melibatkan transparansi, partisipasi, dan kesediaan untuk mendengar dan memahami perspektif yang berbeda.

Salah satu cara membentuk integrasi nasional yang santun dan terbuka adalah melalui kultur politik yang didasari nilai-nilai etika, integritas, dan saling menghormati. Disisi lain para pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya harus menunjukkan perilaku santun, berkomunikasi secara bijaksana, serta berupaya menjaga norma etika dalam Demokrasi yang telah diemban melalui interaksi politik mereka akan terbentuk integrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian kesantunan dalam politik melibatkan pemahaman bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar, bahkan diperlukan dalam membangun keputusan yang lebih baik. Keterbukaan dalam politik harus diperkuat melalui transparansi dalam pengambilan keputusan. Informasi mengenai kebijakan, keputusan politik, dan proses pengambilan keputusan haruslah tersedia dan dapat diakses masyarakat. Secara luas.

Dengan demikian maka akan terbentuk Etika demokrasi yang santun dan terbuka melalui dukungan riil dengan adanya komitmen bersama untuk membangun budaya politik yang didasari oleh nilai-nilai etika, integritas, dan keterbukaan. Ini melibatkan partisipasi aktif, transparansi, kesediaan untuk mendengar, serta menghormati kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Dengan demikian, demokrasi dapat menjadi wahana yang memajukan kepentingan bersama dan menciptakan tatanan yang lebih adil serta inklusif bagi semua warga negara Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan pada sejumlah diskripsi yang telah peneliti paparkan pada pembahasan di atas dapat disimpulkan “ Etika demokrasi dapat membentuk integrasi nasional. “. Hal ini dapat dipertegas bahwa demokrasi tidak hanya bertujuan menciptakan kebebasan mengeluarkan pendapat, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik). Etika harus jadi pedoman dan orientasi dalam pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam menjalani demokrasi.

Terbentuknya integrasi nasional akibat terjadinya kelompok-kelompok yang dipersatukan oleh suatu isu bersama, baik yang bersifat ideologis, ekonomis, maupun sosial. Berdasarkan uraian di atas, maka pada dasarnya pluralitas bagi bangsa Indonesia adalah takdir. Akan tetapi, perbedaan tersebut tidak selalu memisahkan, apalagi menimbulkan pertentangan sepanjang masing-masing anggota masyarakat menyadari akan pluralitas tersebut

Integrasi nasional adalah jalan keluar untuk menghadapi berbagai konflik baik konflik antar-etnik, konflik antar-daerah, konflik antar-agama, konflik antar-partai politik, konflik antar-pelajar, serta sejumlah konflik kepentingan lain semestinya tidak perlu terjadi kalau masing-masing pelaku konflik menyadari bahwa pluralitas bangsa Indonesia sudah menjadi sebuah keniscayaan. integrasi nasional sebagai strategi kebudayaan Indonesia pada dasarnya menyatukan visi dan misi di antara sejumlah kepentingan dan identitas masing-masing anggota masyarakat berlatar belakang kebudayaan yang kompleks. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika dalam penerapan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution, *Pikiran dan Gagasan dalam Demokrasi Konstitusional*
- A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, 2010, h.14- 15
- A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenadamedia Grop, 2003). h. 66-67
- A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 134-136
- Ahmad Syafii Maarif, (2018), *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3 ES) cetakan 1, h. 110
- al, Kompas, Jakarta, 2014, hlm.3-4.
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. , h. 123
- Bagir Manan, *Teori Dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2003), h. 140.
- Dalam Sidi Gazalba, *Sistematika filsafat, Pengantar Kepada Dunia Filsafat, Teori Pengetahuan, Metafisika, Teori Nilai, Buku IV, Cet Kedua, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, dikutip dari Astim Riyanto, Teori Filsafat Hukum, Penrtbit Yappendo Bandung, 2010, Hlm. 710.*
- Dede Rosyada dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003), h. 110.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Cet. Ketiga, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 16-17.*
- H. Kaelan, M.S, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Yogyakarta: PARADIGMA, 2005), h. 55
- H. A. Mustofa, *Akhlaq Tasawuh*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2015, h.42
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.43
- Ignas Kleden dalam makalah berjudul “Identitas dan Integrasi” dalam Kongres Kebudayaan V di Bukittinggi, 19-22 Oktober 2003
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), h. 395.
- Jimly Asshiddiqie, *Etika Penyelenggara Negara, Dalam Kuliah Umum Program Magister Ilmu Hukum*

FH- UP, Jakarta, 2020.

- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 26.
- M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, h. 33
- Mariam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2008), h. 106.
- Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2013), h. 26.
- Moh. Hatta, *Indonesia Merdeka, dalam karya lengkap Merdeka* dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan*, (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), hlm. 8
- Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan Teori dan Praktik*, Bandung, Pustaka Grafika, 2019, h.18
- R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2009, h.2
- Rosita Febriani dkk, *Buku Ajar Etika Profesi Teknologi Informasi*, 2015, h.6-7
- Sri Winata Achmad, *Etika Jawa: Pedoman Leluhur dan Prinsip Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta, Asraka, 2018, h.21
- Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif* (Malang: UMM Pres, 2002), h. 15.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta; Pustaka Gramedia, 2011), hlm. 383